

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.P. Parlindungan, 1989, *Hak Pengelolaan menurut Sistem UUPA*, hlm 34 Mandar Maju, Bandung.
- Andie A. Wicaksono, 2007, *Ragam Desain Ruko (Rumah Toko)*, hlm. 6 Penebar Swadaya, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1971, *Undang-Undang Pokok Agraria Sedjarah Penjusunan, Isi dan Pelaksanaannya*, hlm 277 dan 325 – 326, Djambatan, Jakarta.
- Djulaeka, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, hlm 20 Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Maria S.W., Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, hlm 22 Kompas, Jakarta.
- Maria S.W., Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, hlm 203, Kompas, Jakarta.
- Mestika Zed, 2017 *Metode Penelitian Kepustakaan*, hlm 4-5, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Yamin Lubis, Abdul Rahim Lubis, 2013, *Kepemilikan Properti di Indonesia*, hlm 22 Mandar Maju, Bandung.
- Puji Rahayu, 2019, *Pelaku Kegiatan Ekonomi*, hlm. iii., Alpirin, Semarang.
- R.Setiawan, 2000, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, hlm.82-83, Bina cipta, Bandung.
- Ramli Zein, 1995, *Hak Pengelolaan dalam Sistem Undang-Undang Pokok Agraria*, hlm 24 Rineka Cipta, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, hlm. 45, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 37, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, hlm. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Supriyadi, 2010, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah (Menemukan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian atas Eksistensi Tanah Aset Daerah)*, hlm. 13, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Suteki, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan praktik)*, hlm 152-153, Rajawali Pers, Depok.
- Suyono Sanjaya, Mulyono, 2022, Yuniar Rahmatiar, *Hak-Hak Atas Tanah yang Dapat Dibangun Rumah Susun/Apartemen*, hlm 13, Rajawali Pers, Depok.

Suyono Sanjaya, Mulyono, Yuniar Rahmatiar, 2022, *Hak-Hak Atas Tanah yang Dapat Dibangun Rumah Susun/Apartemen*, hlm 13, Rajawali Pers, Depok.

Urip Santoso, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, hlm. 45, Kencana, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, hlm 7, Mandar Maju, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 59, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Ana Silviana, *Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Diponegoro Private Law Review Jurnal, Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017, hlm. 41

Arif Rifqi, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko Di Wilayah Semarang Barat*, Notarius, Volume 15, (No. 2), 2022, hlm 941

Elita Rahmi, *Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Realitas Pembangunan Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, , Vol. 10 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010, hlm. 351

Eman, *Hak Pengelolaan Setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999*, Majalah YURIDIKA, Vol. 15 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Mei-Juni 2000, hlm. 194

Isti Kusumawardhani, *Perolehan Hak Milik atas Tanah melalui Peningkatan Hak Guna Bangunan pada Rumah Toko (Ruko)*, thesis, Universitas Airlangga, 2007, hlm 16

Jaya, *Eksistensi Keberadaan Hak Pengelolaan*, Makalah, Seminar Nasional, *Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum UNDIP, 17 Nopember 2017.

Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 34

R. Juli Moertiono, *Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, Jurnal J-LAS, Vol. 1, Nomor 3, 2021, hlm 256

R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

- Riris Retno Wulan, *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Kantor Pertanahan Kota Semarang*, Journal of Public Policy and Management Review, Volume 6, (No. 3), 2017, hlm 3
- Rizky Pratama, *Pengawasan Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Terhadap Alih Fungsi Bangunan Rumah Toko (Ruko) Di Kota Pekanbaru Tahun 2013*, JOM FISIP, Volume 3, (No. 2), 2016, hlm 2
- Seventina Monda Devita, *Perkembangan Hak Pengelolaan Atas Tanah Sebelum Dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2 No. 9, 2021, hlm. 883
- Sumardji, *Eksistensi, Pendaftaran, dan Pembebanan Hak Pengelolaan*, Majalah YURIDIKA, Vol. 15 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Januari 2000. Hlm 58

C. Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang rumah susun

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah menyebutkan Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan dan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya;

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Menguasai Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan dan Selanjutnya

Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Negara Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Dalam

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan toko Swalayan,

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1963 tentang Penguasaan tanah-tanah Negara,

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran tanah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah,